

TANSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**Pemahaman Aparat Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat
dalam Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah
Menuju Terciptanya Good Governance**



Diajukan Oleh :

MERY SARTIKA

01013130001

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat

Guna Mecapai Gelar Sarjana Ekonomi

2006

S
657.7807
Sm
1
2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**



SKRIPSI

**Pemahaman Aparat Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat
dalam Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah
Menuju Terciptanya Good Governance**



Diajukan Oleh :

MERY SARTIKA

01013130001

R.14583
14945

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat

Guna Mecapai Gelar Sarjana Ekonomi

2006

Motto :

“Optimislah walau engkau berada ditengah-tengah badai angin topan”

Kupersembahkan Kepada:

- *Rabb-ku*
- *Suamiku Eddy Suroso, ST*
- *Jundi kecilku Hisyam...
Nabil .*
- *Papa dan Mamak*
- *Kakak dan Adikku, Ipar &
Keponakanku Rara.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah segala puji kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemahaman Aparat Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Menuju Terciptanya *Good Gavernance*”.

Adapun tujuan penulisan skripsi adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Studi Strata – 1 (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univesitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari, bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi penulisan dan isinya, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Indralaya, Juli 2006

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Robb semesta alam yang atas izinMu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Suamiku **Eddy Suroso, ST.** *'Bi makasih ye atas dorongan dan sabar ngadepi ummi yang sering buat kesel abi kareno skripsi dak kelar-kelar'*. Dan untuk anakku **'Hisyam Nabil** (titik2nyo tu belum pasti nian apo) yang lahir sehari sebelum ujian komprehensif. *Kalian adalah Keajaiban yang Mempesona bagi ummi.*
3. **Papa dan Mamak, Kak Uga & Yumi, Kak Ari, Wira, Keponakanku Rara & Aji, Bapak dan Mamak, Yuk Sulis, Supri, Suci** dan seluruh keluargaku yang ada di Lahat, Palembang dan Pagar Alam. *Tak cukup hanya dengan kata-kata.....*
4. Bapak Profesor Doktor H. Zainal Ridho Djafar selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Syamsurijal AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dra. Rina Tjandrakirana DP Ak,MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Aspahani SE, Ak, MM selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Bapak Drs. Mukhtaruddin Ak, Msi selaku Pembimbing Skripsi I.
9. Ibu Ermadiani SE, Ak, MM selaku Pembimbing Skripsi II. *'Bu terima kasih banyak nian atas segalanya'*.

10. Bapak Ahmad Subeki SE, Ak selaku Dosen Penguji.
11. Dinas, Badan, Kantor, Bagian Penyusunan Program, Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat.
12. Yuk Ema, Dewi Z, Tika, Yuk Lia, Yuk Nani, Yuk Mul, Yuk Keke, Lenni, Vita, Yanti, Laila, Atun. *Kalian adalah orang-orang yang berarti bagi saya. Makasih semuanya...*
13. Ayuk-ayuk dan adik-adik di Musholla Fakultas Ekonomi "Al-Iqhtishaad". *Makasih atas bimbingan dan arahannya.*
14. Teman-teman Ak 2001, EP 2001, Mgt 2001,1998 ,1999, 2000, 2002, 2003, 2004, Adik-adik se-komprehensif. *Makasih galo-galo.*
15. Dan untuk semuanya yang tidak bisa penulis ketik satu persatu. *Makasiiiiitiiiiih.....*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kerangka Teoritis.....	5
1.6 Metodologi Penelitian	9
1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6.2 Populasi dan Sampel	9
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	10
1.6.4 Analisis Data	11
1.7 Sistematika Pembahasan.....	12



BAB II : LANDASAN TEORI

2.1 Keuangan Daerah.....	14
2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah.....	14
2.1.2 Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	15
2.1.3 Karakteristik Pengelolaan Keuangan Daerah.....	16
2.1.4 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	18
2.1.5 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	19
2.1.6 Hubungan Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah dalam Rerangka Otonomi Daerah.....	21
2.1.7 Hubungan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah dalam Rerangka Pelaporan Keuangan.....	22
2.2 Manajemen Keuangan Daerah.....	22
2.2.1 Pengertian Manajemen Keuangan Daerah.....	22
2.2.2 Manajemen Keuangan Daerah di Era Prareformasi.....	24
2.2.3 Manajemen Keuangan Daerah di Era Pasca Reformasi.....	26
2.3 Akuntansi Keuangan Daerah.....	31
2.3.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah.....	31
2.3.2 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah.....	31
2.3.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	34
2.3.4 Peran Sumber Daya Manusia dalam Akuntansi Keuangan Daerah.....	36

2.4 Good Governance.....	37
2.4.1 Pengertian Good Governance	37
2.4.2 Karakteristik Good Governance.....	38
2.4.3 Tujuan Penerapan Good Governance.....	40

BAB III : ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

3.1 Pemilihan Sampel.....	42
3.2 Hasil dan Analisis Data Penelitian.....	42
3.2.1 Hasil Penelitian dan Analisis Identitas Responden.....	42
3.2.2 Hasil Penelitian mengenai Pemahaman Aparat dalam Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah.....	45
3.2.2.1 Hasil Perhitungan dan Analisis mengenai Latar Belakang Pendidikan.....	45
3.2.2.2 Hasil Penelitian dan Analisis Faktor Pendidikan dan Pelatihan.....	46
3.2.2.3 Hasil Penelitian dan Analisis Faktor Pengetahuan Responden mengenai Akuntansi Keuangan Daerah .	49
3.2.2.4 Hasil Penelitian dan Analisis Persepsi Responden terhadap Akuntansi Keuangan Daerah.....	54

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	59
4.2 Keterbatasan Penelitian.....	60
4.3 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Penelitian mengenai Instansi Tempat Responden Bekerja.....	42
2. Hasil Penelitian mengenai Pendidikan Terakhir Responden	43
3. Hasil Penelitian mengenai Masa Kerja Responden	44
4. Hasil Penelitian mengenai Jabatan/Posisi yang dipegang Responden.....	44
5. Hasil Penelitian mengenai Latar Belakang Pendidikan Responden	45
6. Hasil Penelitian mengenai Faktor Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).....	47
7. Hasil Penelitian mengenai Pengetahuan Responden tentang Akuntansi Keuangan Daerah	50
8. Hasil Penelitian mengenai Persepsi Responden terhadap Akuntansi Keuangan Daerah	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia telah memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa terhadap tingkat kemiskinan. Namun di sisi lain, krisis tersebut telah memberi berkah tersembunyi terhadap upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tema sentral reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance* dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Reformasi ini juga telah memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaharuan paradigma di berbagai bidang kehidupan.

Dengan hembusan reformasi yang terus berlangsung, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang menandai lahirnya era otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk perubahan dalam manajemen atau pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan

yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional, serta perimbangan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memenuhi tuntutan daerah akan kebutuhan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka diakomodasi dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang secara tegas mengatur mengenai alokasi sumber keuangan yang menjadi imbalan bagian daerah.

Dengan semakin luasnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, semakin besar pula tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah kepada publik. Tuntutan akan Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pun semakin meningkat. Semua elemen masyarakat juga ikut dilibatkan dalam mengelola daerah mereka masing-masing sehingga kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik lebih diorientasikan pada pemenuhan aspirasi masyarakat daripada aspirasi pemerintahan atasan.

Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah memerlukan suatu sistem baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah terutama pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten atau kota yang selama ini menggunakan sistem dengan pembukuan harus ditransisi ke sistem akuntansi. Hal inilah yang mendorong penciptaan suatu sistem akuntansi baru yaitu Akuntansi Keuangan Daerah karena sistem yang selama ini

dipakai yaitu sistem akuntansi pemerintahan dengan pembukuannya memiliki banyak kelemahan.

Sejak tahun 1992 Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) melakukan survei lapangan terhadap kemungkinan diterapkannya Akuntansi Sektor Publik (ASP). Akuntansi Sektor Publik yang mengarah pada akuntansi modern dengan sistem *double entry* diharapkan dapat memperbandingkan nilai sumber daya negara antara output dan outcome-nya. Akuntansi Sektor Publik merupakan salah satu alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara disamping supremasi hukum untuk menuju *Good Governance*.

Penerapan Akuntansi Sektor Publik pada Pemerintah Daerah diwujudkan dengan Akuntansi Keuangan Daerah. Akuntansi Keuangan Daerah tersebut merupakan bagian dari Akuntansi Sektor Publik dimana tingkatan tertinggi dalam sektor publik adalah tingkatan Negara. Oleh karenanya, Akuntansi Keuangan Daerah juga berhubungan dengan Akuntansi Keuangan Negara. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah tidak serta merta dapat dilaksanakan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah tingkat pemahaman aparat yang ada pada instansi pemerintah itu sendiri. Dari fenomena tersebut, peneliti tertarik menjadikan hal di atas sebagai objek penelitian dengan judul: **“Pemahaman Aparat Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Menuju Terciptanya Good Governance”**.

1.2 Perumusan Masalah

Akuntansi pemerintahan yang selama ini diterapkan ternyata belum dapat memenuhi keinginan publik. Beberapa kelemahan dalam sistem administrasi negara menimbulkan berbagai kelemahan dalam laporan keuangan pemerintah. Untuk itulah perlu sistem akuntansi modern yakni Akuntansi Sektor Publik (ASP) walaupun banyak pihak yang merasa pesimis dengan berlakunya sistem ini. Kekhawatiran ini juga disebabkan karena banyak pihak meragukan kesiapan aparat yang ada pada instansi pemerintah untuk penerapan akuntansi sektor publik yang merupakan sistem akuntansi yang relatif baru yang sedang disiapkan dalam rangka menciptakan akuntabilitas publik di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Lahat. Oleh karena itulah masalah yang akan diteliti adalah mengenai seberapa besar pemahaman aparat yang ada pada Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam penerapan Akuntansi Keuangan Daerah menuju terciptanya *Good Governance*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pemahaman aparat yang ada pada Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam penerapan Akuntansi Keuangan Daerah menuju terciptanya *Good Governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Mempelajari dan memperdalam wawasan mengenai akuntansi sektor publik khususnya akuntansi keuangan daerah terutama mengenai arah dan perkembangannya pada instansi pemerintah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada sektor pemerintahan dan institusi dalam mengelola keuangan negara sehingga tercipta *good governance*.
3. Dapat memberikan masukan kepada sektor pemerintahan maupun institusi terkait guna menyiasati perkembangan akuntansi sektor publik di masa yang akan datang.
4. Dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana peluang para lulusan akuntansi untuk ikut berpartisipasi dalam sektor pemerintahan dengan ilmu yang telah diperoleh.
5. Sebagai landasan atau bahan informasi untuk penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.5 Kerangka Teoritis

Bergulirnya reformasi keuangan pemerintah dalam rangka pemberlakuan UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999, tidak semulus seperti yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya tidak serta merta mampu mendorong 33 propinsi dan 144 daerah setingkat kotamadya dan kabupaten untuk melakukan perubahan dan perbaikan atas kinerja sektor pemerintahan. Banyak daerah yang menjadi bingung mengenai hal ini.

Pemerintah daerah masih banyak *wait and see* mengenai penerapan Akuntansi Keuangan Daerah ini dengan anggapan apabila segera menerapkan dan ternyata tidak sesuai dengan standar, akan memakan waktu dan biaya lagi untuk melakukan harmonisasi sistem pencatatannya. Padahal, penerapan sistem akuntansi dapat dilakukan mendahului standar, tetapi meskipun ada standar tanpa sistem akuntansi hanya akan menjadi mimpi.

Akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan manajer, yakni, Pemerintah Daerah, dan pemakai laporan keuangan daerah lainnya seperti DPRD, BPK, investor, kreditur, donatur, analis ekonomi, pemerhati Pemerintah Daerah, rakyat dan pemerintah (Abdul Halim, 2002: 22).

Pelaksanaan penerapan Akuntansi Keuangan Daerah didasari oleh peraturan yang mengatur tentang keuangan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 23:

(1) Ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah diatur dengan ketentuan Peraturan Daerah.

(2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah.

Pasal 24:

Kepala daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi.

2. PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 8: APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 14:

Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tentang:

- a. Kerangka dari Garis Besar Prosedur Penyusunan APBD.
- b. Kewenangan Keuangan dari Kepala Daerah
- c. Prinsip-prinsip Pengelolaan Kas
- d. Prinsip-prinsip Pengelolaan Pengeluaran Daerah yang telah dianggarkan
- e. Tata cara pengadaan barang dan jasa
- f. Prosedur melakukan pinjaman daerah
- g. Prosedur pertanggungjawaban keuangan
- h. Dan hal-hal lain yang menyangkut PKD.

Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban & pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Kepmendagri.

Pasal 35:

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

Pasal 38:

Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri atas:

- a. Laporan Perhitungan APBD
- b. Nota Perhitungan APBD
- c. Laporan Aliran Kas
- d. Neraca Daerah.

Selain itu ada beberapa peraturan lain yang mendukung pelaksanaan penerapannya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara pertanggungjawaban Kepala Daerah.
4. Surat Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 Nopember 2000 No. 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2001.

Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (aparatus) yang ada pada Instansi Pemerintah. Terutama yang mempunyai latar belakang akuntansi. Dan juga diperlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan salah satunya dari kalangan akademisi untuk membantu penerapan atau menjadi praktisi di bidang akuntansi sektor publik.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya untuk melihat besar pemahaman aparat yang ada pada Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam penerapan Akuntansi Keuangan Daerah menuju *Good Governance*.

1.6.2 Populasi dan Sampel

Sasaran populasi adalah Pemerintah Kabupaten Lahat baik departemen, non departemen maupun lembaga yang ada di Kabupaten Lahat. Sampel yang akan diambil secara acak (*sample random sampling*), yaitu berjumlah 15 instansi (setiap instansi diwakili 2 responden). Masing-masing sampel mewakili bagian keuangan instansi yang bersangkutan. Instansi atau lembaga pemerintahan yang akan dijadikan sampel yaitu:

1. Sekretariat Daerah
2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
3. Badan Pengawas Daerah
4. Badan Perencanaan Pembangunan
5. Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah
6. Kantor Perpustakaan Daerah
7. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
8. Dinas Pertambangan dan Energi
9. Dinas Transmigrasi dan Kependudukan

10. Dinas Pekerjaan Umum
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil & Menengah
14. Dinas Pemuda dan Olahraga
15. Dinas Informasi dan Komunikasi Pariwisata & Budaya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan yaitu dengan metode penelitian lapangan:

- Teknik Wawancara Tatap Muka (*Face-to-face Interview*) merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan lisan untuk diajukan kepada subjek penelitian. Teknik ini dilakukan apabila responden mudah ditemui dan berada di tempat.
- Teknik Kuisisioner (*Questionnaires*) merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang ada pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran si peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuisisioner. Teknik ini digunakan apabila responden sulit untuk ditemui oleh peneliti.

Pertanyaan yang diajukan hanya terdiri dari pertanyaan tertutup. Pertanyaan tersebut yaitu mengenai:

1. Latar belakang pendidikan dari responden, dalam hal ini latar belakang pendidikan aparat yang ada pada instansi Pemerintah Kabupaten Lahat. Hal ini dilihat dengan menggunakan pertanyaan no.1 dan 2 yang ada pada kuisioner.
2. Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti termasuk pelatihan mengenai penggunaan teknologi dalam akuntansi. Hal ini dilihat dengan menggunakan pertanyaan no. 3, 4, 6, 7 dan 8.
3. Pengetahuan yang mereka miliki mengenai Akuntansi Keuangan Daerah. Hal ini dilihat dengan menggunakan pertanyaan no. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18.
4. Persepsi aparat tersebut terhadap Akuntansi Keuangan Daerah dan penerapannya pada instansi Pemerintah Kabupaten Lahat. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan pertanyaan no. 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25.

1.6.4 Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Jawaban atas pertanyaan tertutup akan diklasifikasi terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam tabel untuk melihat besarnya persentase tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Dari masing-masing tabel yang dihasilkan akan dijelaskan secara deskriptif sesuai dengan kelompok pertanyaan yang telah ditentukan pada bagian pengumpulan data. Hasil akhir analisis data ini akan memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan penulis.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini, di dalam sistematika pembahasan akan diuraikan secara garis besar isi masing-masing bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan. Berisikan, konsep akuntansi keuangan daerah, akuntansi sektor publik, dan faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penerapannya dalam hal ini aparat yang melaksanakan akuntansi sektor publik pada instansi pemerintah, konsep *good governance* serta indikator-indikator yang digunakan dalam penerapan *good governance*.

BAB III ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan hasil pengumpulan data, analisis data atas masing-masing pertanyaan dalam wawancara dan kuesioner terdiri atas analisis identitas responden, latar belakang pendidikan responden, pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pernah diikuti responden, pengetahuan responden mengenai akuntansi keuangan daerah, serta analisis persepsi responden terhadap

akuntansi keuangan daerah. Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran yang dapat diberikan setelah penulis selesai melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, "Akuntansi Sektor Publik di Indonesia". Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Bastian, Indra, dan Soepriyanto, Gatot, "Sistim Akuntansi Sektor Publik": Konsep untuk Pemerintah Daerah. Edisi Pertama (buku satu), Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Halim, Abdul, Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Indriantoro, Nur, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. BPFE – Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
- Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik". Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Media Akuntansi. Jakarta, Juni 2000.
- Sinar Grafika, Redaksi, "Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah". Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Syakhroza, Ahmad, "Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Publik dan Good Government Governance". Majalah Usahawan. No.02 Tahun XXXII, Februari, 2003.
- Yani, Ahmad, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia": Seri Keuangan Publik. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

25	Sistem pembukuan yang berbasis kas sudah kurang relevan dalam pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks.			
----	--	--	--	--

**TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN BANTUAN DARI
BAPAK/IBU.**